

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak-hak masyarakat adat di Thailand saat ini mengalami dampak signifikan dari berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Komunitas adat di Thailand menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti pengusiran dari tanah leluhur, penindasan budaya, dan diskriminasi. Upaya perempuan adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka menjadi fokus penting dalam mencapai keadilan dan kesetaraan (AIPP, 2016).

Masyarakat adat di Thailand telah lama menghadapi diskriminasi berat oleh masyarakat umum Thailand. Istilah “*chao khao*,” yang sering digunakan untuk menyebut orang-orang suku pegunungan, juga diterjemahkan sebagai ‘liar’ atau ‘tidak beradab.’ (*Network of Indigenous Peoples in Thailand*, 2010). Kelompok hak-hak masyarakat adat telah mencoba mendesak masyarakat umum untuk menggunakan terjemahan Thai dari istilah ‘masyarakat adat’ atau “*chon phao phueng mueang*.” Namun, pemerintah Thailand menolak istilah ini, dengan klaim bahwa mereka “tidak dianggap sebagai minoritas atau masyarakat adat tetapi sebagai warga Thailand yang dapat menikmati hak-hak dasar dan dilindungi oleh hukum Kerajaan seperti warga Thailand lainnya” (Erni, 2008).

Pada tahun 2007, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), yang menetapkan standar minimum untuk kelangsungan, martabat, dan kesejahteraan masyarakat adat di dunia. 144 Negara memberikan suara

mendukung Deklarasi tersebut, dengan hanya empat Negara memberikan suara menentang (yang semuanya membatalkan posisi mereka pada tahun 2010) dan 11 Negara abstain. Menurut sebuah studi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2009, masyarakat adat berjumlah sekitar 370 juta di 90 negara di seluruh dunia, mewakili sekitar 5.000 budaya yang berbeda dan mendiami sekitar 20% dari wilayah bumi, yang memiliki 80% keanekaragaman hayati yang tersisa. Di sisi lain, meskipun mereka menyusun sekitar 5 persen dari populasi global, mereka menyumbang 15 persen dari orang miskin ekstrim. Dua pertiga dari masyarakat adat dunia tinggal di Asia dan Pasifik. Perkiraan terbaru dari organisasi masyarakat adat menunjukkan bahwa sekitar 411 juta masyarakat adat tinggal di wilayah Asia saja (*Indigenous People Major Group*, n.d).

Meskipun *The Royal Thai Government* (RTG) memberikan suara mendukung pengadopsian UNDRIP, mereka tidak secara resmi mengakui masyarakat adat di negara tersebut dan hanya mengakui keberadaan “kelompok etnis/minoritas” dan “suku pedalaman”. Menurut Rencana Induk Pemerintah untuk Pengembangan Kelompok Etnis di Thailand (2015-2017), teridentifikasi 56 kelompok etnis yang masih menggunakan praktik-tradisional dan meneruskan kearifan lokal mereka dari generasi ke generasi di 67 provinsi. Jumlah mereka sekitar 6,1 juta orang, lebih dari sembilan persen dari total populasi negara. Kelompok etnis ini dikategorikan ke dalam empat kelompok berdasarkan area tempat tinggal mereka: yang tinggal di daerah dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai, dan hutan. Pemerintah secara resmi mengakui sembilan “suku pedalaman” - Hmong, Karen, Lisu, Mien, Akha, Lahu, Lua, Thin, dan Khamu, sementara sepuluh kelompok kadang-kadang disebutkan,

termasuk Palaung, dalam beberapa dokumen resmi (IWGIA, 2018). Perkiraan terbaru menempatkan jumlah populasi “suku pedalaman” sekitar 1,2 juta orang. Dimulai pada awal tahun 2000 oleh para pemimpin dari sepuluh “suku pedalaman”, gerakan adat di Thailand telah berkembang untuk mencakup perwakilan dari 30 kelompok etnis tambahan dari seluruh Thailand dan memiliki potensi untuk melibatkan semua 56 kelompok etnis atau 6,1 juta orang. Pada saat yang sama, hingga tahun 2017, total populasi Thailand adalah 66,2 juta, di antaranya 65,3 juta adalah warga negara Thailand, sedangkan 875.800 adalah non-warga negara Thailand, yang juga mungkin mencakup beberapa orang yang berasal dari kelompok adat karena sejarah panjang penindasan terhadap kelompok-kelompok tersebut (Morton, 2019).

Di Thailand, tidak ada pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat untuk menentukan batas, penandaan, dan pemberian hak atas tanah mereka sesuai dengan hukum adat, nilai, dan kebiasaan mereka. Kewarganegaraan juga merupakan masalah besar karena banyak dari lebih dari setengah juta penduduk tanpa kewarganegaraan di Thailand adalah masyarakat adat, yang berarti bahwa mereka tidak dapat memiliki tanah, dan oleh karena itu menghadapi penggusuran paksa dan pemindahan, bahkan jika mereka tinggal di tanah yang telah mereka garap selama beberapa dekade atau bahkan lebih lama. Rancangan undang-undang tentang administrasi lokal, yang mencakup kuota untuk perempuan, merupakan langkah positif untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam tata kelola di tingkat lokal. Meskipun status kemajuan undang-undang ini tidak pasti, hal ini menunjukkan bahwa rencana pemerintah Thailand untuk desentralisasi mungkin mencakup tingkat tambon. Hal ini

penting, karena upaya desentralisasi sering kali memiliki dampak negatif pada partisipasi perempuan. Masyarakat adat selalu dianggap sebagai “yang lain,” mengingat perbedaan bahasa, budaya, dan gaya hidup mereka dari mayoritas masyarakat Thailand. Mereka telah dicap sebagai pedagang narkoba, penghancur hutan, dan penghambat pembangunan. Hal ini telah mengakibatkan kompleksitas inferioritas. Bagi perempuan, jenis kelamin mereka menambahkan lapisan diskriminasi lainnya. Ini dapat muncul dalam berbagai cara, misalnya depresi, kurangnya kepercayaan diri, pasifikasi, dan ketakutan untuk keluar dari komunitas mereka. Beberapa dapat pergi ke daerah perkotaan untuk bekerja. Namun, secara umum, mereka bekerja dalam pekerjaan berbayar rendah dan berisiko dieksploitasi. Perempuan muda tergoda untuk bekerja dalam industri seks yang membayar lebih tinggi dan tidak memerlukan pencapaian pendidikan. Bagi yang mampu belajar, pengalaman pelecehan sangat merajalela. Untuk menghindari diskriminasi, beberapa memilih untuk mengganti nama mereka untuk menyembunyikan identitas adat mereka, menguasai bahasa Thailand, dan menolak berbicara dalam bahasa asli mereka (Morton, 2019).

Komunitas adat di seluruh Thailand, terutama di daerah pesisir selatan, menghadapi tantangan serius akibat konflik dengan industri pariwisata, agribisnis, dan ekstraktif. Mereka sering kali mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perlakuan tidak adil terhadap pemimpin adat dan pembela hak asasi manusia. Perempuan adat juga menghadapi diskriminasi dan kekerasan berdasarkan identitas adat dan jenis kelamin, dengan dampak yang lebih besar pada akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Kurangnya partisipasi dan representasi juga memperburuk ketidaksetaraan ini (*Asia Indigenous Peoples Pact & Network of Indigenous Peoples of Thailand*, 2017).

Upaya perempuan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat tercermin dalam keberadaan *Indigenous Women's Network of Thailand* (IWNT). *Indigenous Women's Network of Thailand* (IWNT) adalah organisasi yang berkomitmen untuk memajukan hak-hak perempuan adat di Thailand dan mendukung partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Berakar pada keterlibatan awalnya sebagai bagian dari *Inter-Mountain Peoples Education and Culture in Thailand* (IMPECT) sejak tahun 1996, IWNT beralih menjadi organisasi independen pada tahun 2011, memperkuat fokusnya pada isu-isu yang dihadapi oleh perempuan adat di Thailand. Misalnya, seperti pada tahun 2014, *Indigenous Women's Network of Thailand* (IWNT) melakukan pemetaan komunitas desa San Pa Hieng bersama warga desa, melibatkan 78 orang, di mana 27 di antaranya adalah perempuan. Setiap detail dan informasi yang terdapat dalam peta diperiksa dan dikonfirmasi oleh masyarakat. Setelah proses pemetaan selesai, diadakan pertemuan dengan warga San Pa Hieng dan kantor administrasi kecamatan. Pada tahun 2015, kantor administrasi kecamatan setempat menyetujui peta komunitas tersebut. Kegiatan budaya lainnya juga dilakukan seperti pengajaran bahasa ibu, musik tradisional, pemulihan penceritaan lokal, dll (Hayward, 2017).

Tujuan utama IWNT melibatkan advokasi hak-hak perempuan adat, mempromosikan instrumen nasional dan internasional yang mendukung hak-

hak perempuan adat, meningkatkan partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan lokal, serta mengakui dan mendukung pengetahuan tradisional. Organisasi ini secara aktif berkolaborasi dengan berbagai kelompok etnis atau “*chon paos*” di Thailand, mencerminkan keragaman budaya dan etnis dalam komunitas adat serta menunjukkan pendekatan inklusif dalam memajukan hak-hak perempuan adat.

Fokus utama IWNT melibatkan penanganan tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan adat, seperti diskriminasi gender, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Organisasi ini menempatkan penekanan khusus pada upaya advokasi untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan adat baik secara individu maupun kelompok.

IWNT juga aktif terlibat dalam upaya kolaboratif dengan Yayasan Manushya, memeriksa dan menilai kepatuhan pemerintah Thailand terhadap rekomendasi yang diterimanya, khususnya yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan adat. Secara esensial, IWNT memainkan peran krusial dalam mendukung perempuan adat Thailand, dengan pendekatan yang terfokus dan upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak perempuan adat di berbagai aspek kehidupan.

Organisasi ini menjadi suara yang kuat dalam advokasi hak-hak komunitas adat baik di tingkat nasional maupun internasional, sambil juga mempromosikan keberlanjutan budaya dan lingkungan untuk generasi mendatang. Keterlibatan masyarakat adat untuk mendukung kampanye ini juga didasarkan pada fakta bahwa orang kaya, yang hanya mencakup 10% dari

populasi di Thailand, memiliki total 600.000 rai tanah (240.000 hektar), dengan rata-rata 100 rai/orang, sedangkan sekitar dua juta keluarga petani miskin, termasuk masyarakat adat, memiliki tanah yang tidak mencukupi atau bahkan tidak memiliki tanah untuk kehidupan dan kelangsungan hidup mereka.

Selain itu, sekitar satu juta keluarga petani adat yang telah tinggal di dataran tinggi untuk waktu yang lama dan komunitas nelayan di bagian selatan Thailand yang bergantung pada sumber daya laut tiba-tiba diberi pemberitahuan bahwa mereka menduduki area konservasi negara. Advokasi berkelanjutan dari masyarakat sipil dan organisasi masyarakat adat telah membuka ruang dan solusi bagi masyarakat adat untuk memperoleh kartu identitas nasional. Ini termasuk Komisi Hak Asasi Manusia Nasional yang mendesentralisasi pekerjaan bantuannya dalam masalah ini.

Meskipun demikian, banyak anak masyarakat adat yang masih belum memiliki kewarganegaraan hingga saat ini karena berbagai faktor. Mengakui pentingnya kewarganegaraan dan kartu identitas nasional sebagai upaya pemberdayaan masyarakat adat secara umum dan khususnya perempuan dan gadis adat, IWNT terus memberikan informasi dan bantuan kepada anggota komunitas. Meskipun dokumentasi merupakan tantangan, IWNT telah berupaya melakukan survei di distrik Chiang Dao dan Vienghang di provinsi Chiangmai, serta distrik Pangmapha dan Pai di provinsi Maehongson sebagai cara untuk menentukan status kewarganegaraan masyarakat adat di daerah-daerah ini tempat mereka bekerja. Survei menunjukkan hanya delapan anggota komunitas enam perempuan dan dua laki-laki dari tiga distrik yang menunggu persetujuan aplikasi mereka. IWNT sangat bersemangat untuk menghasilkan

materi pengetahuan dari pengalaman mereka dalam pekerjaan mereka terkait kewarganegaraan, untuk menyebarkan informasi ke komunitas adat lainnya serta pekerjaan advokasi mereka. Inisiatif dokumentasi ini juga memberikan rasa kebanggaan di antara anggota komite IWNT, tidak hanya karena mereka terlibat dalam proses tersebut, tetapi juga karena hasilnya yang memberikan mereka perasaan pencapaian (IWGIA, 2019).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dijabarkan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, *the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang dirumuskan pada tahun 2007, dalam konteks ini, menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dampak dan kontribusi perempuan masyarakat adat dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan global (UNDRIP, 2007;). SDGs, sebagai serangkaian tujuan yang mencakup pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender, menilai sejauh mana peran dan kontribusi perempuan masyarakat adat dapat diintegrasikan dan diakui dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan (Agenda 2030, PBB). Selain itu, mempertimbangkan dampak dan prinsip-prinsip UNDRIP dalam kerangka implementasi SDGs, dengan melibatkan perspektif hak-hak tanah, sumber daya alam, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (UNDRIP, 2007).

Pada tanggal 6-8 Oktober 2018, *Asia Indigenous Women's Network* (AIWN) berkumpul di Prince Hotel, Bangkok, Thailand, untuk Konferensi Perempuan Adat Asia ke-4 (AIWC) (AIWN, 2018). Dengan tema "*Indigenous Women Matter: Resilience, Governance, and Sustainable Development,*" konferensi ini menjadi platform penting bagi perempuan adat untuk berkumpul

dan berdiskusi mengenai isu-isu krusial (AIWN, 2018). Ditegaskan kembali pentingnya perempuan adat dalam konteks ketahanan, tata kelola yang efektif, dan perjuangan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya tema “*Indigenous Women Matter*” dalam konferensi ini menekankan peran unik yang dimainkan oleh perempuan adat dalam komunitas mereka dan konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan (AIWN, 2018). Diskusi dan pernyataan yang dibuat selama acara bertujuan untuk menyoroti ketahanan yang ditunjukkan oleh perempuan adat, kebutuhan akan inklusi mereka dalam struktur tata kelola, dan peran kunci mereka dalam berkontribusi pada inisiatif pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pengulangan atas Lima Pernyataan menegaskan kembali komitmen untuk mengakui dan mengatasi tantangan dan kontribusi spesifik perempuan adat (AIWN, 2018). Pernyataan-pernyataan ini kemungkinan mencakup prinsip-prinsip utama dan tuntutan terkait hak-hak, kesejahteraan, dan pemberdayaan perempuan adat, memberikan suara bersama mengenai isu-isu seperti hak atas tanah, pelestarian budaya, dan kesetaraan gender.

IWNT berperan dalam mengadvokasi hak-hak perempuan adat di Thailand, menghadapi diskriminasi gender dan tantangan lainnya. Organisasi ini bekerja dalam kerangka memperjuangkan partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan lokal serta mengakui pengetahuan tradisional. Melalui upaya advokasi, IWNT berusaha memperkuat posisi perempuan adat dalam dinamika kekuasaan antara komunitas adat, pemerintah, dan pihak lain yang berpengaruh. Meskipun beberapa perempuan melaporkan kurangnya dukungan untuk berperan dalam ranah publik, IWNT memperjuangkan peran perempuan

sebagai pemimpin dan mengatasi kesenjangan komunikasi (*A Report on the Southeast Asia Consultation on Development, Access to Justice and the Human Rights of Indigenous Women*).

Perempuan adat di Thailand telah mengalami peningkatan status dan peran dalam beberapa tahun terakhir, dari menjadi ibu dan istri menjadi pemimpin di ranah publik. IWNT memberdayakan perempuan melalui pelatihan harga diri dan rasa percaya diri, serta menciptakan ruang aman bagi mereka untuk mendiskusikan isu-isu sensitif seperti kekerasan berbasis gender. Organisasi ini juga mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan, mengubah pandangan tradisional tentang perempuan sebagai ‘pengikut’ dengan memberikan mereka pendapatan yang stabil dan kemandirian finansial (Tantiwiranond & Pandey, 1987).

Partisipasi IWNT dalam politik dan kegiatan publik telah meningkatkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas desa secara keseluruhan, dengan perempuan adat aktif menghadiri pertemuan komunitas dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan lokal. Melalui upaya ini, IWNT membantu memajukan hak-hak perempuan adat serta meningkatkan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat Thailand (Munslow, 2020).

IWNT dan komunitas perempuan adat lainnya mengadakan pertemuan bulanan yang memberikan platform bagi anggota komunitas untuk membahas perkembangan, kebijakan, dan tantangan dalam komunitas mereka. Tradisi ini sebelumnya didominasi oleh pria, tetapi sekarang lebih dari 90% peserta adalah perempuan, menunjukkan dorongan IWNT terhadap partisipasi perempuan

dalam ranah publik. Ini mencerminkan upaya IWNT dalam mempromosikan peran perempuan adat dalam arena publik, di mana mereka secara aktif mengangkat isu-isu dan kekhawatiran (IWGIA, 2022).

IWNT juga berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan adat di Thailand, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pengusiran dari tanah, penindasan budaya, dan diskriminasi. Upaya advokasi IWNT meliputi pemberdayaan perempuan adat melalui inisiatif pendidikan, pelatihan, dan pelestarian warisan budaya mereka. Ini tidak hanya bertujuan untuk melawan pengusiran fisik dari tanah, tetapi juga untuk melawan penghancuran identitas budaya mereka (*A Report on the Southeast Asia Consultation on Development, Access to Justice and the Human Rights of Indigenous Women*).

Selain itu, IWNT berupaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan adat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan lebih luasnya, sehingga mereka memiliki suara yang kuat dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan di komunitas mereka. Ini menunjukkan bahwa IWNT tidak hanya fokus pada pelestarian aspek materi dari kehidupan perempuan adat, tetapi juga pada pemberdayaan mereka sebagai pemegang kebijakan dan pemimpin di tingkat lokal (Report from the United Nations Development Fund for Women UNIFEM, n.d.).

Melalui upaya ini, IWNT berusaha mencapai dampak jangka panjang dengan membangun fondasi bagi perubahan positif yang berkelanjutan dalam kehidupan perempuan adat. Peran IWNT sebagai katalisator perubahan sosial yang bekerja untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi oleh

perempuan adat, sambil secara aktif mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian budaya.

Selain itu, keterlibatan IWNT dalam mengatasi dampak proyek-proyek pembangunan berskala besar terhadap komunitas adat tercermin dalam kerjasamanya dengan organisasi global. Contoh konkret dari upaya ini adalah advokasi IWNT untuk hak-hak masyarakat adat dari sebuah kelompok adat di Thailand yang menghadapi tantangan signifikan akibat pembangunan pantai yang cepat. IWNT, sebagai agen perubahan, mengarahkan strategi advokasinya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan budaya komunitas masyarakat adat (IWNT & Manushya, 2019).

Dalam konteks ini, IWNT terlibat dalam mendukung penelitian ilmiah tentang dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan tertentu, memastikan bahwa suara dan perspektif masyarakat adat, terutama perempuan adat, diakui dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan terkait (Manushya, 2020). IWNT, dengan dukungan dana dari Asia Foundation, memulai proyek untuk meningkatkan partisipasi perempuan adat dalam politik. Mereka memberikan pelatihan dan kesempatan kepada pemimpin perempuan adat, termasuk pelatihan "*Training of Trainers*", untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merencanakan dan memberikan pelatihan kepada komunitas mereka sendiri. IWNT juga melakukan restrukturisasi organisasinya untuk memastikan partisipasi yang efektif dan mengadvokasi untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan suku (IWNT & Manushya, 2019).

Proyek ini melibatkan pelatihan sepuluh perempuan adat dari sepuluh kelompok adat berbeda di Thailand, termasuk tentang hak asasi manusia dasar dan pentingnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan lokal. IWNT juga mendukung perempuan adat untuk mencalonkan diri dalam jabatan lokal dan membantu mereka menulis studi kasus tentang diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan dalam kelompok etnis mereka. Studi kasus ini kemudian digunakan untuk menyusun laporan yang diserahkan kepada komite CEDAW untuk memberikan komentar kepada pemerintah Thailand. Selain itu, IWNT melakukan advokasi melalui kampanye publik, pelibatan dengan pihak berkepentingan, dan partisipasi dalam forum internasional untuk mendapatkan dukungan global dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Mereka juga menggarisbawahi peran penting perempuan adat dalam pelestarian lingkungan dan warisan budaya komunitas mereka (IWNT, 2019).

Dalam hal ini, IWNT mendapatkan dukungan dalam pelatihan tata kelola lokal dan kepemimpinan untuk memberdayakan lebih banyak perempuan agar terlibat dalam struktur administrasi lokal. Dukungan ini dapat meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan pemahaman perempuan terhadap proses tata kelola, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di tingkat tambon. Advokasi untuk implementasi efektif undang-undang ini dan inklusi perempuan dalam administrasi lokal akan sangat penting untuk mempromosikan tata kelola responsif gender dan memastikan bahwa rencana desentralisasi memberikan manfaat bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin. Melalui partisipasi aktif dalam dialog global dan

advokasi, IWNT berupaya menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat adat. Pada intinya, kasus ini menyoroti peran IWNT sebagai mediator antara komunitas adat dan arena global, bekerja untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan hak-hak mereka dilindungi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang cepat (IWNT, 2019).

IWNT dengan jelas telah membantu membuka mata banyak pemimpin perempuan adat yang, setelah menyadari pentingnya berpartisipasi dalam ruang publik dan pengambilan keputusan, melangkah maju untuk mencalonkan diri dalam jabatan lokal. Meskipun beberapa dari mereka berhasil mengatasi hambatan di komunitas mereka karena perbedaan gender dan terpilih dalam jabatan lokal, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Perempuan adat perlu bekerja lebih keras dan lebih baik daripada rekan-rekan mereka yang laki-laki agar diakui, diterima, dan terpilih sebagai pejabat dan pemimpin lokal. Sebagai perempuan, mereka bekerja tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas mereka agar memenuhi kualifikasi posisi, mereka juga harus membuktikan bahwa mereka tidak hanya baik sebagai putri, istri, dan ibu, tetapi juga sebagai pemimpin komunitas mereka (IWNT & Manushya, 2019).

Dengan beban ganda ini, tidak mudah bagi perempuan adat untuk memikirkan, apalagi masuk, ke arena publik. Tetapi ketika suara perempuan kurang dan dikecualikan dari proses pengambilan keputusan, tidak mungkin bagi negara untuk maju dengan kokoh. Di tingkat komunitas lokal, perempuan adat harus bekerja dengan gigih untuk membuktikan kepada keluarga, teman, dan komunitas mereka bahwa mereka mampu dan mampu memimpin. Dukungan yang kuat sangat penting jika seorang perempuan ingin

berpartisipasi dan berperan dalam ruang publik. Juga penting adalah adanya hukum yang mendukung perempuan dalam upaya mereka untuk berpartisipasi dalam politik guna meningkatkan jumlah dan suara mereka dalam pembangunan negara (THAILAND UPR III 2021, n.d.).

Dengan demikian, isu hak masyarakat adat di Thailand menunjukkan kepentingan dan kompleksitas dalam melibatkan masyarakat adat dalam pemberdayaan dan pengakuan di Thailand. Dalam konteks ini, IWNT telah berperan penting dalam membangun kapasitas perempuan adat lokal, memberikan pelatihan, dan mendukung partisipasi mereka dalam ruang publik setempat. Meskipun telah terjadi kemajuan, tantangan yang kompleks masih perlu diatasi, termasuk diskriminasi gender, ketidakmengakuan hak-hak masyarakat adat, dan tekanan dari kepentingan ekonomi yang mendominasi.

Peran IWNT mencerminkan pentingnya dukungan transnasional dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan perempuan di tingkat nasional. Melalui upaya-upaya ini, IWNT telah memberikan sumbangan penting untuk memberdayakan perempuan adat, meskipun masih ada hambatan yang harus diatasi. Dengan begitu, pengembangan strategi dan kerja sama lintas batas dapat menjadi kunci dalam mencapai perubahan positif bagi masyarakat adat di Thailand. Upaya jaringan advokasi transnasional seperti IWNT menunjukkan bahwa perjuangan untuk hak-hak masyarakat adat dan perempuan memerlukan kolaborasi, kesadaran global, dan aksi bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun tantangan tetap ada, keberlanjutan upaya ini dapat memberikan dampak positif dalam perubahan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Thailand.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan *Transnational Advocacy Network* dalam *Indigenous Women’s Network of Thailand* (IWNT) Terhadap Isu Hak Masyarakat Adat di Thailand”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran jaringan advokasi lintas batas seperti IWNT dalam mengatasi masalah hak-hak masyarakat adat di Thailand. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana IWNT membangun kapasitas kelompok Masyarakat adat, strategi apa yang mereka gunakan dalam advokasi mereka, dan apa saja yang telah mereka capai dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang upaya advokasi lintas batas dalam mendukung hak-hak masyarakat adat di Thailand.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana upaya advokasi *Indigenous Women’s Network of Thailand* (IWNT) digunakan untuk mendorong hak-hak masyarakat adat?”

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini akan difokuskan pada implementasi dari strategi IWNT melalui tinjauan peran IWNT, khususnya dalam isu pemberdayaan dan pengakuan perempuan adat pada Tahun 2020—2023. Pembatasan tersebut berdasarkan data yang diperoleh, dimana terjadinya peningkatan kasus diskriminasi terhadap masyarakat adat secara signifikan pada periode tersebut.

1.4 Tujuan & Kegiatan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi advokasi yang digunakan oleh *Indigenous Women's Network of Thailand* (IWNT) dalam mendorong hak-hak masyarakat adat, terutama dalam pemberdayaan dan pengakuan perempuan adat di Thailand. Secara khusus, tujuan penelitian ini mencakup:

1. Mengidentifikasi persoalan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat adat.
2. Menganalisis strategi advokasi yang dilakukan oleh IWNT terhadap isu hak masyarakat adat di Thailand.
3. Meninjau hasil dan kendala advokasi yang dilakukan oleh IWNT dalam mencapai pengakuan hak-hak masyarakat adat, dengan fokus pada peran perempuan adat di Thailand.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis:

- a. *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dalam memberikan pemahaman lebih mendalam tentang hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh UNDRIP, memperkaya pemahaman teoritis terkait aspek legal dan hak asasi masyarakat adat.
- b. Ketahanan Tradisi Adat yang meningkatkan pemahaman tentang kepercayaan tradisi adat istiadat sebagai warisan

leluhur yang masih menjadi pedoman hidup, memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dijaga dan dijunjung tinggi dalam konteks masyarakat adat di Thailand.

- c. Perbandingan Hukum Internasional dan Lokal yang mengetahui perbandingan antara hukum internasional, seperti UNDRIP, dengan hukum adat lokal, serta pemahaman bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam konteks lokal Thailand.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Kontribusi Terhadap Kebijakan Pemerintah yang memberikan masukan berharga untuk membentuk kebijakan pemerintah terkait upaya penghapusan tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat, khususnya dalam praktik masyarakat adat di Thailand.
- b. Dukungan LSM dan Komunitas Advokasi Hak Asasi Manusia dari hasil penelitian dapat digunakan oleh LSM dan komunitas advokasi hak asasi manusia untuk memperkuat advokasi mereka dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya perempuan adat.
- c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam praktik masyarakat adat di Thailand, dengan fokus pada pemberdayaan dan pengakuan perempuan adat.